

**Ali Usman, Ketua PATAKA**

## Strategi dan Implementasi Kebijakan: Menjaga Ketahanan Harga Beras dan Inflasi. Kepastian Jumlah CBP, Bunga Rendah dan Ruang Penyaluran

### DASAR PEMIKIRAN

Komoditas beras memberikan andil inflasi sebesar 2,5 persen (YoY), dengan andil pada inflasi sebesar 0,08 persen. Pada September 2022 BPS mencatat, rata-rata harga GKG di petani Rp5.802 per kg atau naik 5,58 persen, dan di penggilingan Rp5.916 per kg atau naik 5,37 persen. Sedangkan rata-rata harga beras premium di penggilingan Rp10.252 per kg, naik 3,55 persen dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan harga beras medium di penggilingan Rp9.785 per kg atau naik sebesar 4,56 persen. Jika dibandingkan September 2021, rata-rata harga beras di penggilingan pada September 2022 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik 8,43 persen; 9,18 persen; dan 10,21 persen.

### KAJIAN EMPIRIS

Ada beberapa hal diduga pemicu kenaikan harga gabah dan beras. Pertama, musim panen padi cukup rendah pada bulan tertentu. Kedua, Implikasi kenaikan harga BBM yang mengerek biaya logistik dan transportasi. Ketiga, efek samping kebijakan Bansos seperti BPNT melalui mekanisme pasar bebas. Tidak melalui BULOG. Keempat, kebijakan fleksibilitas gabah dan beras. Kelima, pembatasan pemberian pupuk subsidi. Keenam, tidak ada kepastian stok CBP dan penyalurannya. Ketujuh, peran swasta besar menguasai stok dan market beras. Selama ini ada 11 regulasi yang mengatur tentang ketahanan pangan atau CBP. Sedangkan dalam Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pasal 28 ayat (1&2) Kemendag dan Kementan mendelegasikan kewenangan kepada Bapanas. Terkait Jumlah CBP, HPP dan Rafaksi harga untuk stabilisasi pasokan dan harga.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah harus memperbaiki pengelolaan Cadangan Pangan Nasional (CPN) yang tidak hanya beras, juga komoditas lain agar kelangkaan pasokan bisa dikendalikan dalam memperkuat Cadangan Pangan Nasional (CPP) untuk ketersediaan dan stabilisasi pangan.
2. Pemerintah perlu memperbaiki sistem logistik nasional yang integrasi dengan kebutuhan pangan nasional.
3. Pemerintah perlu segera menetapkan Perpres CPP agar pemerintah tidak hanya memiliki cadangan pangan beras saja, namun komoditas lain sesuai penugasan kepada Bapanas.
4. Pemerintah perlu membantu BUMN Pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, untuk mendapatkan pinjaman bunga rendah, stok modal kerja pembelian bahan pangan.
5. BULOG harus turun langsung ke petani tidak melalui mitra terutama kondisi sekarang yang urgent sekali jumlah masih 700 an ribu ton sementara masih termasuk 380 ribu ton untuk program KPSH
6. Pemerintah perlu mendengarkan pendapat dari para penulis maupun para pemerhati agar mendapat view yang out of the box.
7. Pengelolaan CPP tidak bisa mengandalkan Bapanas namun harus didukung oleh semua pihak untuk kolaborasi bersama. Terutama K/L terkait, BULOG, ID Food, juga PTPN untuk membeli produk petani dengan harga layak.
8. HPP dan HAP perlu di review, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kenaikan harga bahan baku dan BBM juga beberapa kenaikan biaya-biaya transportasi, penyimpanan dan lain-lain.
9. Pemerintah harus menyediakan instrumen pembiayaan yang murah untuk memperkuat BUMN Pangan, sebagai pilar menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga maka berikan juga instrument pembiayaan dengan Dana yang murah.
10. Pemerintah idealnya mengevaluasi HET dan HPP secara berjangka 3-6 bulan sekali untuk mengetahui apakah masih sesuai atau tidak. Dengan adanya evaluasi bisa diketahui Ketika keadaan sudah tidak pas, dan harus diganti.
11. Pemerintah perlu memberikan bantuan benih, subsidi pupuk, dan traktor combine guna meningkatkan efisiensi bagi para petani.